

**KEBERLANJUTAN  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON FORMALDALAM  
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA MISKIN**

**Gatot Sugeng Purwono<sup>1)</sup>, Agustin HP<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Ekonomi Pembangunan, STIE Mandala Jember

email: [gatotsgp@yahoo.com](mailto:gatotsgp@yahoo.com)

<sup>2</sup>Manajemen, STIE Mandala Jember

email: [agustin@stie-mandala.ac.id](mailto:agustin@stie-mandala.ac.id)

**ABSTRACT**

*The existence of Microfinance Institutions (MFIs) non-formal become the foundation of micro-entrepreneurs of poor households in the middle of the limitations of access to formal financial institutions . To develop the capacity of business , micro financing for poor households served many non-formal MFIs . The question is; the extent of non -formal MFIs serve as an alternative source of financing for the development of micro poor households?, and extent of non-formal MFIs can be formulated and recommended for the development of micro poor households?. The study was conducted in the District of Jember Kencong targeting non-formal MFIs and micro entrepreneurs poor household member non-formal MFIs . This study is the first year of a two year study is planned. The objective inventory of non-formal MFIs effectively and sustainably manage savings and loans potentially serve microenterprises poor households. Descriptive analysis, MFIs independently constructed by society more sustainable potential compared with other parties initiated by the government for example .*

**Keywords:** MFIs, savings, sustainability, micro-enterprise

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Lembaga keuangan mikro non formal merupakan lembaga penyedia jasa keuangan mikro yang tidak berbadan hukum seperti dipersyarat-

Banyak lembaga keuangan formal seperti bank meluncurkan skim kredit

kan dalam “UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”.

Lembaga penyedia jasa keuangan ini sering disebut sebagai “lembaga keuangan mikro jendela ketiga” (*the 3<sup>rd</sup> window MFI*).

khusus untuk usaha mikro, tetapi dalam implementasinya masih sulit

diakses. Tidak lebih dari 5% pengusaha mikro yang memanfaatkan skim kredit usaha mikro tersebut (Gatot Sugeng Purwono, 2004).

Lembaga keuangan mikro non formal lebih berkomitmen melayani pengusaha mikro rumah tangga miskin. Lembaga keuangan mikro non formal tumbuh dan berkembang hampir di seluruh Indonesia. Survey yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencatat, sekitar 600 ribu lembaga keuangan mikro non formal melayani sekitar 39 juta orang penabung dan 36,9 juta peminjam pengusaha mikro rumah tangga miskin (*Suara Merdeka*, 20 Februari 2007). Lembaga keuangan mikro non formal berasumsi bahwa masyarakat miskin pada dasarnya juga memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan ekonomi, tetapi dibatasi oleh kurangnya akses kredit dan penyediaan tabungan serta fasilitas asuransi (Hulme, Arun 2009).

Selama ini lembaga keuangan mikro non formal menjadi agen jasa keuangan bagi usaha mikro rumah tangga miskin, dan menjadi tumpuan pembiayaan. Persoalannya adalah pengawasan terhadap lembaga

keuangan mikro non formal relatif lemah dan bahkan tidak ada, sehingga sebagai nasabah, usaha mikro rumah tangga miskin tidak ada jaminan perlindungan keamanan.

Fenomena seperti diuraikan di atas sangat merugikan pengusaha mikro, terutama pengusaha mikro rumah tangga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses modal usaha. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada lembaga keuangan mikro non formal yang telah banyak melayani pengusaha mikro rumah tangga miskin.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- (1). Mengidentifikasi karakteristik lembaga keuangan mikro non formal yang efektif dan berkelanjutan melayani pengembangan usaha mikro rumah tangga miskin.
- (2). Mengetahui peran lembaga keuangan mikro non formal dalam membantu pengembangan usaha mikro rumah tangga miskin.
- (3). Menemukan model lembaga keuangan mikro non formal yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembiayaan usaha

mikro rumah tangga miskin secara berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pendahuluan yang dilakukan terhadap lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) terkait dengan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember, disimpulkan bahwa lembaga ini memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, karena sebagian besar masyarakat miskin menggantungkan aktivitas ekonominya kepada LKMM (Gatot Sugeng Purwono, 2009). Sebagai Lembaga Keuangan Mikro non formal, LKMM telah menumbuhkan sumber keuntungan di wilayah dusun. Perputaran modal meskipun kecil, keberadaannya cukup signifikan menggerakkan roda perekonomian rumah tangga miskin. LKMM berhasil mengubah pola hidup anggotanya dan berpengaruh terhadap perilaku para ibu rumah tangga dalam memandang dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Kepercayaan diri tumbuh sejalan dengan perbaikan ekonomi, yang diikuti dengan perbaikan kesehatan dan perbaikan pendidikan. Akhirnya

LKMM menjadi institusi fundamental dan menjadi mesin ekonomi keluarga miskin di wilayah dusun yang layak dijadikan alternatif desain pengentasan kemiskinan.

*Asian Development Bank* mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Direktorat Pembiayaan Deptan (2004) menjelaskan, LKM dikembangkan berdasarkan semangat membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin. Berdasarkan fungsinya, jasa keuangan mikro yang dilaksanakan LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Menurut Krishnamurti (2005), meskipun banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum ada tiga elemen penting yang tersirat di dalamnya yaitu; Pertama, Lembaga

keuangan mikro menyediakan pelayanan keuangan beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. Kedua, keberadaannya berawal dari melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Ketiga, prosedur dan mekanisme yang dikembangkan selalu kontekstual dan fleksibel.

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibedakan menjadi LKM formal, LKM semi formal, dan LKM non formal. Khusus LKM non formal keberadaannya dibentuk atas inisiatif masyarakat atau ditumbuhkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta beberapa dinas pemerintah daerah. Misalnya Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Baitul Mall Watamwil (Direktorat Pembiayaan Deptan, 2004).

Keberadaan LKM non formal yang eksis di tengah kehidupan masyarakat, selain berperan sebagai lembaga ekonomi juga berperan

sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, LKM non formal diartikan sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku dan interaksi sosial warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1999).

Haynes (2000) memberi contoh keberhasilan peranan suatu lembaga sosial masyarakat di Sri Lanka, yaitu *Gerakan Sarvodaya Shramadana* (GSS) dalam pembangunan pedesaan. GSS didirikan pada tahun 1958 oleh seorang guru berumur 26 tahun, yaitu A.T. Ariyatne. Perhatian GSS mencakup pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan air dan sanitasi, pertanian, tabungan, kredit, serta industri pedesaan dan pemasaran.

Berdasarkan contoh kasus di atas, sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan masyarakat, kelembagaan sosial ekonomi skala mikro memiliki nilai strategis karena beberapa hal, yaitu; (1) menjadi wadah penampung harapan dan pengelola aspirasi kepentingan pembangunan warga, (2) menggalang seluruh potensi

sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat, sehingga kemampuan kolektivitas, sumber daya, dan akses masyarakat meningkat, (3) memperkuat solidaritas dan kohesivitas sosial sehingga kemampuan gotong-royong masyarakat berkembang, (4) memperbesar kemampuan *bargaining position* masyarakat dengan pihak-pihak atas desa, dan (5) mengembangkan tanggung jawab kolektif masyarakat atas pembangunan wilayah (Kusnadi, 2006).

Akhirnya lembaga keuangan mikro non formal menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Lembaga keuangan mikro non formal tidak hanya melayani pengusaha mikro yang membutuhkan pinjaman (kredit), tetapi juga melayani/menerima tabungan anggotanya.

### 3. METODE PENELITIAN

#### a. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Luas wilayah kecamatan Kencong 5865,3 ha, terbagi menjadi lima wilayah desa, yaitu Desa Wonorejo, Kencong, Kraton, Paseban, dan Desa Cakru.

#### b. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian adalah LKM non formal yang berada di Kecamatan Kencong yang tersebar di lima desa dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; (1) melakukan pertemuan rutin dalam enam bulan terakhir minimal satu bulan sekali, (2) mempunyai kepengurusan minimal ketua, sekretaris, dan bendahara, (3) usia LKM non formal minimal satu tahun, (4) salah satu kegiatan LKM non formal mengelola keuangan dalam bentuk simpan-pinjam untuk anggota, dan (5) LKM non formal bukan kategori kelompok olah raga atau kelompok kesenian dan sejenisnya.

#### c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi LKM non formal. Inventarisasi dilakukan

melalui penelusuran ke beberapa instansi terkait seperti instansi di jajaran Pemkab Jember, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat rukun tetangga (RT). Tahap kedua, melakukan verifikasi hasil inventarisasi LKM non formal dan menetapkan LKM non formal yang memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai subyek penelitian. Tahap ketiga, mengukur efektivitas dan keberlanjutan LKM non formal dalam mengelola simpan-pinjam melayani kebutuhan pengusaha mikro rumah tangga miskin.

Data yang dikumpulkan pada tahap ketiga ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari karakteristik LKM non formal, kinerja keuangan simpan pinjam, permodalan, kapasitas lembaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap LKM non formal. Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, seperti kantor desa, kantor kecamatan, Bank Indonesia, dan kantor statistik di Kabupaten Jember. Untuk akurasi data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan verifikasi melalui

wawancara mendalam, observasi non partisipasi, dan diskusi kelompok terarah atau FGD (*Focus Group Discussion*). Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa pengurus dan anggota LKM non formal, serta beberapa informan. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh data tentang peran LKM non formal, baik peran sosial dan peran ekonomi di masyarakat. Observasi dilakukan untuk mencocokkan jawaban-jawaban responden dalam kuesioner dengan keadaan lingkungan, dan memperoleh informasi mendalam tentang aktivitas LKM non formal yang tidak mungkin didapat melalui kuesioner. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan dengan membentuk grup diskusi kecil, dan sebagai partisipan adalah subyek penelitian yang merepresentasikan keragaman populasi. Obyek pembicaraan difokuskan pada obyek penelitian, terutama berkaitan dengan peran LKM non formal di masyarakat dan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan kebutuhan data penelitian.

d. Variabel dan Definisi Operasional

(1). Kinerja keuangan LKM non formal mengelola simpan-pinjam diukur dengan indikator kesehatan keuangan LKM non formal dalam mengelola simpan-pinjam.

Indikator kesehatan keuangan LKM non formal diukur dengan 11 sub indikator, yaitu; Tingkat tunggakan dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah tunggakan}}{\text{jumlah sisa pinjaman}} \times 100\%$$

Tingkat pertumbuhan kekayaan dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah kekayaan tahun ini} - \text{jumlah kekayaan tahun lalu}}{\text{jumlah kekayaan tahun lalu}} \times 100\%$$

Tingkat pertumbuhan modal sendiri dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah SP + SW + SS + Cad. tahun ini} - \text{jumlah SP + SW + SS + Cad. tahun lalu}}{\text{jumlah SP + SW + SS + Cad. tahun lalu}} \times 100\%$$

Tingkat hutang dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah hutang}}{\text{jumlah modal sendiri}} \times 100\%$$

Tingkat angsuran pinjaman, dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah angsuran semua pinjaman LKM bulan itu}}{\text{jumlah penerimaan uang tunai LKM bulan itu}} \times 100\%$$

Tingkat penggunaan dana produktif, dihitung dengan rumusan

$$\frac{\text{bagian kekayaan yang menghasilkan}}{\text{jumlah kekayaan}} \times 100\%$$

Tingkat hasil usaha, dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah pendapatan hingga akhir tahun}}{\text{rata - rata kekayaan yang produktif}} \times 100\%$$

Tingkat perputaran dana, dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah pinjaman yang dicairkan selama setahun}}{\text{rata - rata jumlah kekayaan}} \times 100\%$$

Tingkat ketanggahan menanggung risiko, dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah dana cadangan} + SP + SW}{\text{jumlah nominal tunggakan}} \times 100\%$$

Tingkat kehematan biaya, dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{biaya selama setahun}}{\text{pendapatan selama setahun}} \times 100\%$$

Tingkat pemerataan pinjaman, dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{jumlah peminjam yang masih mempunyai sisa pinjaman}}{\text{jumlah anggota}} \times 100\%$$

(2). Permodalan adalah jumlah simpanan anggota dan pinjaman dari pihak ketiga, dan dihitung dengan satuan rupiah.

(3). Kapasitas LKM adalah kualitas sumber daya manusia, kelompok nasabah, peran tokoh masyarakat, manajemen operasional, dan jangkauan LKM yang secara teknis diukur dengan menggunakan skala Likert.

(4). Tingkat kepercayaan masyarakat diukur dari;

(a). Jumlah nasabah/anggota dihitung dalam satuan orang.

(b). Nilai pinjaman nasabah/anggota dihitung dalam satuan rupiah.

(c). Sistem pelaporan dilakukan secara tertulis dan rutin minimal setiap bulan sekali dan disampaikan secara lisan kepada anggota.

e. Analisis

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(1). Mentransformasi nilai yang didapat pada setiap variabel ke dalam nilai baku (z-scor) dengan rumus:

$$Z = \frac{X - M}{SD}$$

Keterangan; “Z” nilai baku, “X” skor, “M” rerata, “SD” simpangan baku.

(2). Menjumlahkan nilai baku semua variabel untuk mendapatkan satu nilai efektivitas dan keberlanjutan LKM non formal.

(3). Mengkonversi nilai efektivitas dan keberlanjutan LKM non formal pada sub (2) ke dalam



Klasifikasi	Interval
Sangat efektif dan berkelanjutan	$x > M + 1,8 SD$
Efektif dan berkelanjutan	$M + 0,6 SD < x \leq M + 1,8 SD$
Cukup efektif dan berkelanjutan	$M - 0,6 SD \leq x \leq M + 0,6 SD$
Tidak efektif dan tidak berkelanjutan	$M - 1,8 SD \leq x \leq M - 0,6 SD$
Sangat tidak efektif dan tidak berkelanjutan	$x < M - 1,8 SD$

LKM non formalyang diteliti dengan kriteria sebagai berikut:

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Pemerintahan

Secara administratif Kecamatan Kencong merupakan bagian dari [Kabupaten Jember](#). Posisinya terletak kurang lebih 45 km ke arah barat dari Kota [Jember](#), dan berada pada ketinggian antara 0 meter sampai dengan 12 meter di atas permukaan laut (dpl).

##### b. Sosial ekonomi penduduk

Penduduk Kecamatan Kencong sebanyak 65.248 jiwa yang terbagi dalam 18.583 rumah tangga dan

menempati wilayah seluas 5.865, 3 ha di lima desa, 24 dusun, 123 rukun warga (RW), dan 526 rukun tetangga (RT). Dari 18.583 rumah tangga tersebut 17,1 di antaranya tergolong rumah tangga miskin. Sebaran rumah tangga miskin seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Miskin menurut Desa Tahun 2011

<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>Rumah Tangga Miskin</b>	<b>% Penduduk Miskin</b>
Paseban	2.161	346	16,0
Cakru	3.146	454	14,4
Kraton	2.743	423	15,4
Wonorejo	3.936	723	18,4
Kencong	6.597	1.228	18,6
Jumlah	18.583	3.174	17,1

Sumber: Kecamatan Kencong dalam angka, 2011

Sektor pertanian menjadi aktivitas ekonomi utama sebagian besar (64,8%) rumah tangga masyarakat Kencong. Berikutnya diikuti aktivitas ekonomi di perdagangan dan industri rumah tangga masing-masing 9,1% dan 3,0%.

#### c. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro

LKM di Kecamatan Kencong terdiri dari LKM formal dan LKM non formal. Perbedaan mendasar kedua LKM tersebut adalah LKM formal memiliki badan hukum, sementara LKM non formal berasal dari pribadi atau kelompok yang tidak berbadan hukum. LKM formal terdiri dari bank

yaitu BPR dan bank-bank konvensional yang khusus menangani kredit usaha mikro seperti Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, BRI unit, dan lain-lain, serta bukan bank seperti koperasi. Sedangkan LKM informal di antaranya adalah LKM yang dibentuk atas inisiatif masyarakat seperti kegiatan simpan pinjam yang dibentuk oleh masyarakat, rentenir, dan arisan. Ada sepuluh LKM formal di Kecamatan Kencong seperti KUD, Koperasi Non KUD, dan BRI.

#### d. Lembaga Keuangan Mikro Non Formal

Penjaringan LKM non formal di wilayah Kecamatan Kencong yang

didasarkan pada kinerja keuangan simpan pinjam, permodalan, kapasitas lembaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap LKM non formal terjaring 51 LKM non formal yang terbagi menjadi enam jenis kelompok, yaitu kelompok PNPM 29%, kelompok PKK (Dasa Wisma) 14%, kelompok pengajian 27%, kelompok tani/nelayan 10%, kelompok usaha mikro (perdagangan/industri) 16%, dan kelompok arisan 4%. LKM non formal tersebut selama ini secara rutin melakukan pertemuan minimal sekali dalam enam bulan terakhir; mempunyai kepengurusan minimal ketua, sekretaris, dan bendahara; usia minimal satu tahun; salah satu kegiatannya mengelola keuangan dalam bentuk simpan-pinjam untuk anggota; dan bukan kategori kelompok olah raga atau kelompok kesenian dan sejenisnya. Karakteristik LKM tersebut sebagai berikut:

(1). PKK / Dasa Wisma

Secara struktural Dasa Wisma merupakan bagian dari organisasi PKK yang berada di tingkat paling bawah. Dasa artinya sepuluh dan wisma mempunyai pengertian rumah, dimaksudkan sebagai

pengorganisasian setiap 10 kepala keluarga untuk mempermudah jalannya suatu program PKK. Peranan kelompok Dasa Wisma sangat penting dan strategis untuk merealisasikan program pemberdayaan keluarga hingga membentuk masyarakat yang sejahtera. Aktualisasi program pokok PKK di Kecamatan Kencong banyak didominasi melalui tingkat kelompok Dasa Wisma di setiap desa. Seperti program sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan koperasi, kelestarian lingkungan hidup dan lain-lainnya.

Di sisi lain kelompok Dasa Wisma di wilayah Kencong juga berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal untuk usaha mikro. Pelayanan tidak hanya terbatas pada anggotanya yang jumlahnya 10 kepala keluarga, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Misalnya di Desa Kraton, Dasa Wisma Melati yang mengelola simpan-pinjam melayani usaha mikro yang anggotanya sampai 247 kepala keluarga. Perputaran kegiatan simpan-pinjam dilakukan setiap bulan sekali.

(2). Kelompok Pengajian

Kelompok pengajian merupakan kelompok atau jama'ah yang belajar tentang agama. Kelompok pengajian merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat. Di Kecamatan Kencong kelompok pengajian yang berbasis keagamaan bukan hanya sekedar membahas masalah keagamaan atau pengajian, tetapi juga membahas ekonomi, sosial, dan bahkan membahas masalah politik. Kelompok pengajian menempati posisi sentral dalam berjalannya kelompok sosial di Kecamatan Kencong, karena pengajian merupakan salah satu proses sosialisasi nilai atau norma-norma kelompok terhadap para anggotanya. Pengajian dapat meningkatkan solidaritas anggota karena berbagai persamaan baik itu ideologi, cita-cita, maupun musuh bersama. Solidaritas inilah yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai modal dasar tanggung renteng dalam kegiatan simpan pinjam.

Motivasi mengikuti pengajian umumnya mencari pahala dan ridho Allah. Hasil wawancara, alasan lainnya adalah bersosialisasi dan

mempererat rasa kebersamaan antar warga. Adanya pengajian sangat membantu, terutama dalam hal sosial kemasyarakatan dan ekonomi melalui kegiatan simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan usaha atau kebutuhan hidup rumah tangga.

### (3). Kelompok Tani dan Nelayan

Kelompok tani adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan sama. Kelompok tani beranggotakan petani-nelayan, hubungan antara anggota erat, mempunyai pandangan, kepentingan yang sama dalam mengelola usahatani, mempunyai kesamaan jenis komoditas usaha, usahatani yang diusahakan merupakan sebuah ikatan fungsional/ bisnis, dan mempunyai tujuan yang sama.

Permasalahan pokok yang dihadapi petani atau kelompok tani di Kecamatan Kencong dalam pengembangan usaha agribisnis adalah lemahnya permodalan, sehingga usahatani yang dijalankan berjalan kurang optimal. Salah satu cara untuk mendapatkan modal adalah melalui pemupukan modal/tabungan yang

dikelola oleh kelompok tani. Beberapa petani di Kecamatan Kencong membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang menangani kegiatan simpan pinjam atau tabungan dari para petani. Unit usaha simpan pinjam dari Lembaga Keuangan Mikro petani ini memberi kesempatan bagi anggotanya untuk menabung dan meminjam. Sebelum meminjam, terlebih dahulu anggota kelompok tani harus menabung sebagai kas kelompok, yang besarnya sesuai kesepakatan. Tabungan adalah bagian dari pengeluaran dan bukan sisa dari pengeluaran. Modal (tabungan) sangat penting bagi petani dan keluarganya dalam mengembangkan usaha atau memulai usaha baru. Kelompok tani harus menjamin petani sebagai anggota tidak meminjam ke pihak lain untuk menabung. Melalui kebiasaan menabung membuat petani menjadi rajin datang dalam pertemuan kelompok dan ada kepercayaan serta kebersamaan.

#### (4). Kelompok Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau

mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Modal usahanya tergolong mikro, tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/ kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Kegiatan usaha mikro belum disertai analisis kelayakan usaha dan rencana bisnis yang sistematis. Usaha mikro hanya mengandalkan kerja keras pemilik yang sekaligus sebagai pemimpin usaha.

Kegiatan usaha mikro menggunakan teknologi sederhana dengan bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil, dan menghadapi persaingan ketat. Jenis usaha mikro, antara lain; warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu; Industri kecil seperti konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/ kompor sablon.

Jasa seperti tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit. Pertanian/peternakan seperti usaha tanaman sawah, tegal, ternak ayam buras, itik petelur dan potong, dan perikanan lele.

Untuk memenuhi kebutuhan modal, pengusaha mikro membentuk Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok pengusaha mikro yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KUM adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. KUM diperlukan, karena usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan/pendidikan, sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi sederhana, serta tidak memiliki akses kepada sumber modal. Kerjasama dalam bidang ekonomi tersebut bukan semata-mata kumpulan modal, tetapi kumpulan orang yang mempunyai kepentingan sama. Menjadi anggota KUM didasarkan atas kesadaran,

bersifat sukarela, dan terbuka untuk umum. Berusaha atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya. Mengadakan pertemuan anggota secara rutin dan teratur dan mengadakan kegiatan tabungan secara teratur.

KUM bertujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi rumah tangga anggota dengan mempelajari bersama serta menanamkan pengertian dan tatalaksana ekonomi yang sehat, baik ekonomi keluarga maupun ekonomi bersama para anggota, mengembangkan sikap ekonomi yang sehat di antara para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta lebih sadar diri dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Memberikan pelayanan kepada para anggota baik dalam kebutuhan-kebutuhan usaha maupun rumah tangga. Membina dan mengembangkan usaha dalam bidang organisasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.

KUM memfasilitasi sumber keuangan kepada para pelaku usaha

mikro, membimbing anggota dalam menggunakan kredit. Menggerakkan anggota untuk membiasakan menabung dan jiwa wirausaha. Memperlancar dan mempermudah kegiatan penyetoran tabungan, pencairan kredit, penyetoran angsuran dan pengurusan administrasi usaha. KUM berfungsi sebagai wadah untuk musyawarah dalam mengembangkan usaha dan memfasilitasi anggota dalam memperoleh bantuan, baik berupa modal usaha, pelatihan dan bimbingan usaha.

#### (5). Kelompok Arisan

Kegiatan arisan merupakan budaya turun temurun hingga sekarang yang sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari masyarakat kaya sampai masyarakat miskin di lingkungan masing-masing. Pengertian arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara peserta arisan untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Berarisan sama

artinya bertemu (berkumpul) secara berkala untuk melakukan kegiatan arisan. Di Kecamatan Kencong, arisan berupa uang dengan nominal masing-masing kelompok arisan antara Rp20.000,- sampai dengan Rp100.000,- per minggu. Pada tiap minggu salah satu peserta mendapatkan dua puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah kali jumlah peserta arisan pada masing-masing kelompok arisan. Pada minggu berikutnya undian dilanjutkan untuk peserta yang belum mendapatkan. Peserta yang sudah pernah mendapatkan undian tetap harus menyetor uang tiap minggu sampai semua peserta mendapatkan undian.

Mencermati kegiatan arisan di wilayah Kencong, secara sosial maupun ekonomi mempunyai nilai positif, antara lain; (1) kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan. (2) kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya dalam jangka waktu tertentu. (3) dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu. (4) jika mendapat undian "arisan" di awal periode berarti mendapatkan pinjaman

tanpa bunga, dan (5) sarana berlatih untuk menabung.

Apabila dilihat dari segi keuangan, arisan pada dasarnya tidak memiliki keuntungan, dalam arti bahwa uang yang ditabung selama satu putaran sama saja dengan yang didapatkan. Bedanya adalah, kalau dapat di awal undian seperti mendapatkan pinjaman yang bisa dicicil pembayarannya tanpa bunga. Tetapi kalau dapatnya di akhir, maka seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil. Meskipun tidak ada keuntungan secara langsung dalam arti bahwa ada kelebihan dari uang yang ditabung, tetapi ada satu pelajaran, yaitu peserta arisan bisa secara disiplin menabung, dan ini menjadi pembelajaran penting dari sekedar keuntungan uang. Oleh karena itu, peserta arisan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk mengikuti arisan;

(a). Walaupun bisa mendapatkan undian arisan pada saat-saat awal tetapi jangan pernah ikut arisan hanya karena termotivasi pada hadiah, karena arisan sifatnya

tidak bisa dipastikan kapan mendapatkannya.

(b). Pastikan bahwa sanggup membayar iuran arisan yang diikuti, dan jangan hanya ingin bersosialisasi memaksakan diri ikut arisan yang iurannya terlalu tinggi.

(c). Jangan pernah absen dari iuran arisan walaupun sudah pernah mendapatkan undiannya. Kalau anda tidak bisa hadir dalam acara arisan, pastikan bahwa bisa secara rutin tetap menyetor uang arisan.

(6). PNPM Mandiri - Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah; (1). PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui



harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (2). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Istilah PNPM Mandiri sering dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, seperti; PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM

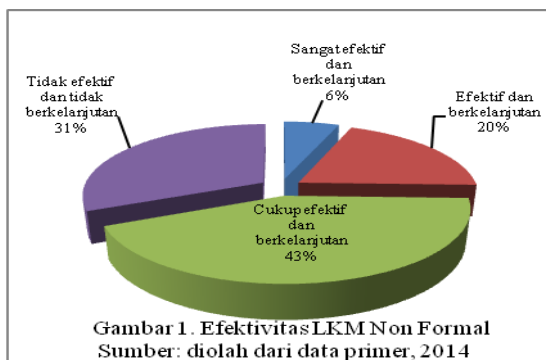
Mandiri Pariwisata. Semua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri. Salah satu program nasional PNPM Mandiri Perdesaan adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Anggota SPP untuk masing-masing kelompok berjumlah 10 orang. Masing-masing anggota meminjam satu juta rupiah dengan bunga 1,5% dalam jangka waktu sepuluh bulan. Dibandingkan dengan LKM non formal lainnya yang minimal sebesar 2% dirasakan tidak memberatkan anggota SPP. Pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan juga tidak memberlakukan potongan administrasi. Hanya dengan bermodal kepercayaan terhadap masyarakat yang bersedia mandiri merupakan kunci utama keberhasilan program

PNPM Mandiri Perdesaan melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.

e. Efektivitas LKM Non Formal Mengelola Simpan Pinjam

Hasil identifikasi dan analisis yang diukur dari kinerja keuangan LKM non formal mengelola simpan-pinjam, permodalan, kapasitas LKM, dan tingkat kepercayaan masyarakat, sebagian besar (69%) sangat efektif,



Kegiatan perekonomian di pedesaan wilayah Kecamatan Kencong masih di dominasi oleh usaha-usaha skala mikro. Para pelaku usaha ini pada umumnya masih di hadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal di wilayah Kecamatan Kencong dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor ekonomi

efektif, dan cukup efektif dan berkelanjutan menjalankan kegiatan simpan pinjam melayani usaha mikro rumah tangga miskin. Sisanya 31% tidak efektif dan keberlanjutannya diragukan melayani usaha mikro rumah tangga miskin. Gambar 1 mendeskripsikan efektivitas LKM non Formal menjalankan kegiatan simpan pinjam melayani usaha mikro rumah tangga miskin di Kecamatan Kencong.

di pedesaan. Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi *entrypoint* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus. Walaupun kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek *spatial* dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor yang berbasis pertanian.

Diakui bahwa, beberapa program pemerintah di wilayah Kecamatan Kencong telah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan produksi (misalnya komoditas padi), tetapi ada indikasi bahwa kinerjanya tidak memuaskan terutama pada lembaga keuangan sebagai pelaksana. Lemahnya kinerja lembaga keuangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana, dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya lembaga keuangan yang terbentuk setelah program selesai. Akibatnya, peserta program umumnya akan kembali mengalami kekurangan modal usaha.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal, masyarakat mengoptimalkan potensi lembaga keuangan mikro non formal yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi usaha mikro. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha

penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non formal. Lembaga ini tumbuh dan mengakar di tengah kehidupan masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan dan belum dibina secara optimal oleh pihak terkait.

#### f. Potensi dan Peran LKM

Pemberdayaan usaha mikro dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian wilayah pedesaan Kecamatan Kencong yang pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Hal ini tidak lepas dari peran usaha mikro yang strategis baik dilihat dari kualitas maupun kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan dalam penyerapan tenaga kerja.

Usaha mikro, sesuai dengan skala usahanya pada dasarnya tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan formal yang besar untuk mendanai usaha mikro karena nilai transaksinya sangat tinggi. Lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha mikro sama

dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha. Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses lembaga perbankan formal.

Keterbatasan usaha mikro dalam mengakses lembaga perbankan formal merupakan potensi pasar yang sangat besar yang bisa menjadi ladang garapan LKM non formal. Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM non formal lebih tinggi dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur dan administrasi peminjaman, LKM non formal memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak ada persyaratan agunan atau jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM non formal, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan sering disesuaikan dengan *cash flow* peminjam.

Secara empiris potensi LKM non formal di wilayah Kecamatan Kencong dalam membantu permodalan usaha mikro masyarakat miskin setidaknya telah dibuktikan oleh kinerja enam jenis LKM yang sebagian besar relatif baik dan dimungkinkan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pengembalian pinjaman dan perputaran dana relatif cepat. Artinya, keberadaan LKM non formal memang dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang menjalankan usaha mikro. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbaikan taraf hidup kehidupan rumah tangga pengusaha mikro seperti dalam pemenuhan konsumsi pangan, pakaian, pendidikan, maupun dalam investasi usaha.

Seperti dikemukakan Krishnamurti (2003), bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan (mikro), hampir seluruh rumah tangga miskin bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang. Kondisi ini akan

membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha berbasis di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

## 5. KESIMPULAN

a. Pembangunan perekonomian di Wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember masih menghadapi kendala terbatasnya modal para pelaku usaha mikro rumah tangga miskin. LKM non formal berpotensi sebagai sumber pembiayaan usaha mikro rumah tangga miskin.

b. Lembaga keuangan mikro non formal yang dikelola masyarakat di Kecamatan Kencong berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi usaha mikro rumah tangga miskin dalam pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro rumah tangga miskin.

c. Lembaga keuangan mikro non formal pada dasarnya merupakan bentuk pra koperasi, sehingga potensial dapat diformulasikan dan direkomendasikan untuk pengembangan usaha mikro rumah tangga miskin di tengah terbatasnya akses lembaga keuangan formal menjangkau usaha mikro rumah tangga miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembiayaan, 2004. *Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro untuk Sektor Pertanian (Pedoman dan Kebijakan)*. Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta.

Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) FE Undip, *Sinergi Lembaga Keuangan Mikro Formal dan Informal*, Suara Merdeka. Selasa, 20 Februari 2007

Gatot SP, 2004. *Kelangsungan Usaha Pengusaha Mikro Menghadapi Keterbatasan Akses Sumber Daya Modal*. Laporan Hasil Penelitian. STE Mandala Jember

Hulme, David & Arun, Thankom (2009). *Microfinance A Reader*. New York, Routledge.

Krishnamurti, B. 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia*. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.